

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafiie, 2011;5).

Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea ke empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan, pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Sementara itu, dalam Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sementara pemerintah merupakan organyang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis, sedangkan tugas-tugas bersifat dinamis. Seseorang melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Ndraha (2005;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu, pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahanyang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek

pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Menurut Sedarmayanti (2004;35) pemerintahan atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011;20).

Namun, menurut Apeldoore dalam Supriyatno (2009:22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut:

Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa;

Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain;

Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam artian Kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh Lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang tergantung (terlibat), kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah disebut penguasa (memiliki wewenang), dan pihak yang dipengaruhi memiliki ketaatan. (Syafiie, 2005;20).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. (Ndraha, 2003;5).

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (dalam Munaf 2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Sedangkan pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Remijen, perbuatan pemerintah yang merupakan “bestuur handling” yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.

Dari keseluruhan definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dalam mengkoordinasi,

memimpin dalam hubungan antara dengan masyarakat, antara departemen dan unit tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Syafiie (2007;4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut

Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.

Setelah di tambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

3. Konsep Kebijakan

Negara Indonesia ini menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kabijakan” jadi dari terjemahan “policy” yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian “publik” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Antara kebijaksanaan dan kebijakan, perbedaan yang membedakan “policy” sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “discretion” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Duun (dalam Mulya 2012:14) mengemukakan proses pembuat kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutnya menurut nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Menurut Duun (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijeskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Sedangkan lebih jauh dijelaskan Heglo dan Jones menguraikan kebijakan menjadi lima isi, yaitu pertama adalah tujuan, yang dimaksud tujuan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Dan kelima, adalah dampak (effect) yakni, dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat (dalam Abidin, 2012:6).

Sedangkan menurut pendapat Keban (2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya manusia yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah dari orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kebijakan publik menurut pendapat Prewitt (dalam Putra, 2014:14) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Putra, 2014:15) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Dari definisi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan kebijakan bersifat politis yang merupakan proses pembuatan kebijakan yang tahapannya tergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan, agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

4. Konsep Pelaksanaan Fungsi

Menurut Saefullah (2007:39) pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauh mana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata, pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Menurut Komaruddin (1994:768) mendefinisikan fungsi (function) sebagai berikut :

- a. Kegunaan;
- b. Pekerjaan atau jabatan;
- c. Tindakan atau kegiatan prilaku; dan
- d. Katagori bai aktivitas-aktivitas.

Menurut Terry (2001:23) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk

mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Setiap implementasi kebijakan yang diintrusikan atasan melalui pemerintah yang komunikatif, persuasif dan administrator menerima secara baik implementasi kebijakan atau program akan berjalan dengan baik. Tapi bila sebaliknya yang terjadi, implementasi akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya, oleh adwards III (1980:89)

Selanjutnya menurut Ndraha (2005:57) ada dua definisi mengenai fungsi, yaitu :

- a. Definisi pertama, fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dengan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi ini yang dianut oleh birokrasi Indonesia. Di dalam susunan dan tata kerja organisasi, tugas pokok dulu, baru fungsi.
- b. Definisi kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Konsep Organisasi

Didalam sebuah Negara untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam upaya pencapaian tujuan Negara, maka

diperlukan sebuah organisasi. Manusia tanpa organisasi dan tanpa bantuan sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk dapat mewujudkan impian, cita-cita dan tujuan hidupnya. Dengan ketergantungan organisasi serta orang lain inilah yang mendorong manusia untuk bekerjasama dan berorganisasi. Kenyataan inilah yang memungkinkan berhasil atau tidaknya kehidupan manusia, terwujudnya suatu impian serta cita-cita manusia tergantung kepada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia yang lebih efisien, efektif, dan produktif.

Menurut Winardi (2009:43) organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan dapat bekerjasama sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama. Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks.

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka dalam yang mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Organisasi berasal dari bahasa inggris yaitu organization, yang berakar dari latin organiz (are), kemudian dalam bahasa inggris “organize” yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dan bagian-bagian berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi ini maka organisasi bisa berarti organism yang melakukan organizing dan juga berarti keluaran (produk, output) organizing.

Menurut Sulistiyani (2011:273) organisasi adalah suatu kesatuan yang meningkatkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat oleh suatu tujuan individu atau secara perorangan, begitu juga dalam hal pemerintahan, aparatur Negara dapat dipandang sebagai suatu wujud organisasi/kelompok masyarakat yang berhimpun kedalam berbagai lembaga Negara yang ada untuk mencapai tujuan Negara.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung suatu organisasi.

Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran.

Dari berbagai macam kriteria pandangan tentang organisasi, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut Rosenweg dalam Hanim dan Adnan, (2005:1) organisasi dapat dipandang sebagai berikut :

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok;
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama; dan
- c. Orang-orang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

6. Teori Koordinasi

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011:290) koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk mennggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Handoko (2003:196) juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koodinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Selanjutnya Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-

satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Serta menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan.

Sedangkan Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Teori koordinasi menurut Yohanes Yahya (2006 : 95) adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Dan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberi lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

1. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi yaitu :

Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawab.

Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparap) yang setingkat.

2. Sifat-Sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi adalah Dinamis bukan Statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

3. Syarat-Syarat Koordinasi

Menurut Hasibuan (2007:88) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi yaitu :

- a. Sense of cooperation (peranan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
- b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.

- c. Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. Espirit De Corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

7. Teori Peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itupun dari pada dengan posisinya.

Dan menurut Soekanto (2001:268) memberi pengertian tentang peranan adalah peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, dan perbedaan peranan dengan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana dengan halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan intraksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh :

1. Norma yang berlaku dalam situasi intraksi yaitu sesuai dengannorma keseragaman yang berlaku pada keompok/masyarakat dalam situasi yang sama.

2. Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
3. Apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi antara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma-norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Menurut Judistira (dalam Giroth, 2004:25-26) bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Kemudian selanjutnya menurut Soekanto bahwasanya pengertian peranan di dalam pengertian terdapat pengertian dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola hidup masyarakat sendiri. Peranan baru ada jika ada kedudukannya, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti

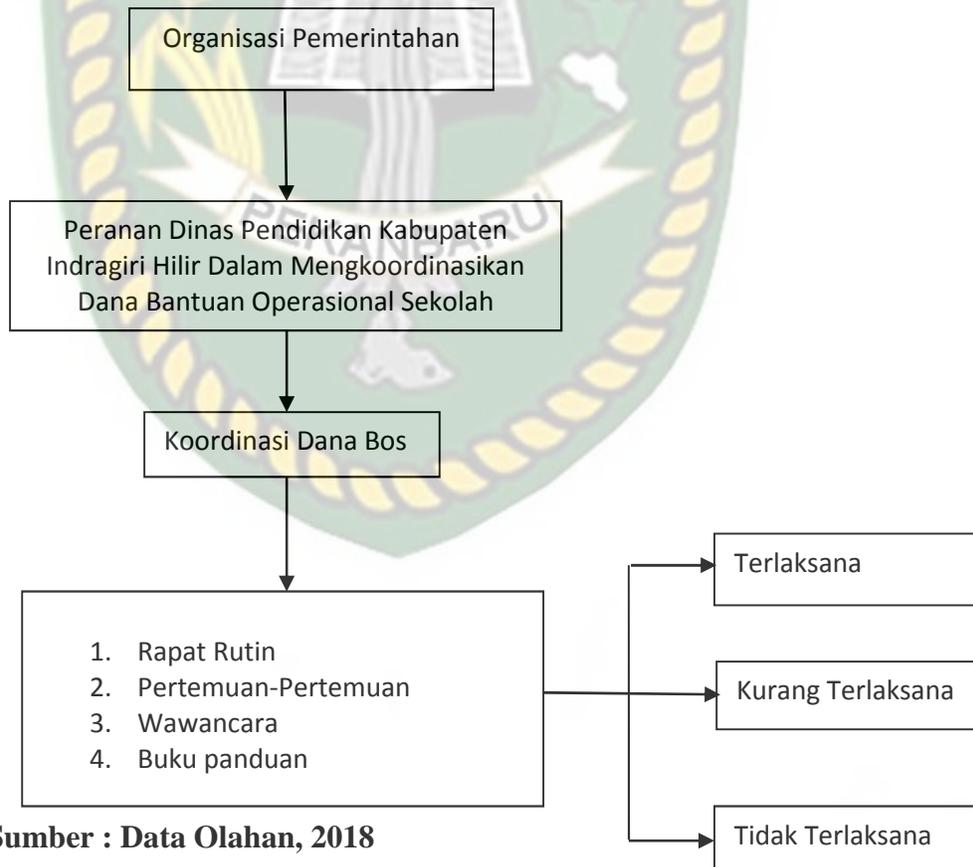
orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1983:147).

Menurut Westa dalam Fakhriani (1985,55-65) koordinasi antara lain :

1. rapat rutin
2. Pertemuan-pertemuan bawahan yang terlibat
3. Wawancara dengan bawahan yang terlibat
4. Buku panduan

B. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 Kerangka pikiran



Sumber : Data Olahan, 2018

C. Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, dan persepsi serta untuk menghindari kesalahan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka penulis merasa perlu untuk membatasi dan mengoperasikan konsep-konsep yang dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat tercapai, diantaranya :

Untuk tetap terlaksananya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Koordinasi adalah sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dengan pihak sekolah, guna mencapai keserasian dan keselarasan dalam hal mengkoordinasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Indragiri Hilir. Dana (BOS), diartikan sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi kebutuhan sekolah yang membutuhkan nya.

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel penelitian Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dalam Mengkoordinasikan Bantuan Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Ukuran
Koordinasi : koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk mennggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Taliziduhu Ndraha (2011:290)	Peranan Dinas pendidikan dalam mengkoordinasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Indragiri Hilir	1. Rapat rutin	a. Dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan b. Rapat rutin harus melibatkan pihak sekolah c. Membahas secara teknis penyaluran Dana BOS Kab.Indagiri Hilir	- Terlaksana - Kurang terlaksana - Tidak terlaksana
		2. Pertemuan-pertemuan berkala untuk pejabat tertentu	a. Pertemuan-pertemuan kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan b. Pertemuan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan.	- Terlaksana - Kurang terlaksana - Tidak terlaksana
		3. Wawancara dengan bawahan/pihak yang terlibat	a. Adanya interaksi antara atasan dan bawahan yaitu Dinas Pendidikan dengan Tim PKPS-BBM dan pihak sekolah b. Adanya keterbukaan atasan dan bawahan dalam membahas dana BOS c. Pesan yang disampaikan memakai bahasa/ tulisan yang jelas.	- Terlaksana - Kurang terlaksana - Tidak terlaksana
		4. Buku pedoman BOS	a. Terdapat buku BOS b. Berpedoman pada buku panduan BOS c. Aturan mudah dipahami	- Terlaksana - Kurang terlaksana - Tidak terlaksana

Sumber : Data modifikasi penelitian 2018

E. Teknik Pengukuran

Dalam melakukan pengukuran indikator variabel penelitian dalam pelaksanaan koordinasi diukur dengan mempergunakan 3 kriteria pengukuran :

Terlaksana :Apabila indikator variabel berada pada kategori terlaksana $>66\%$

Kurang terlaksana :Apabila indikator variabel berada pada kategori terlaksana 34-66%

Tidak terlaksana :Apabila indikator variabel berada pada kategori terlaksana $<34\%$

Pengukuran terhadap baik, cukup baik dan tidak baik terhadap sub indikator yang dimaksud, tergantung pada hasil pengklasifikasian tanggapan responden. Untuk melakukan pengklasifikasian yang dimaksud diukur dengan pedoman sebagai berikut:

1. Rapat rutin

- a. Dilakukan minimal satu kali dalam sebulan
- b. Rapat rutin yang dilakukan harus melibatkan pihak sekolah
- c. Membahas secara teknis mengenai penyaluran dana BOS di Kabupaten Indragiri Hilir.

Terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana >66%

Kurang terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana <34%

2. Pertemuan-pertemuan berkala untuk pejabat tertentu, meliputi :

Pertemuan-pertemuan kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan

Pertemuan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan

Terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana >66%

Kurang terlaksan : Apabila indikator di atas terlaksana 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana <34%

3. Wawancara dengan bawahan/pihak yang terlibat :

- a. adanya wawancara yang dilakukan antara Kepala Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir dengan pihak sekolah
- b. Adanya interaksi antara atasan dan bawahan yaitu Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah
- c. Adanya keterbukaan atasan dan bawahan dalam membahas dana BOS

Pesan yang disampaikan memakai bahasa/tulisan yang jelas

Terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana >66%

Kurang terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana 34-66%

Tidak terlaksana :Apabila indikator di atas terlaksana <34%

4. Buku panduan yang meliputi :

- a. Terdapat buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan yang mengatur tentang pelaksanaan penyaluran dana BOS di Kab. Indragiri Hilir
- b. Pelaksanaan penyaluarn dana BOS di Kab. Indragiri Hilir berpedoman pada buku panduan BOS
- c. Aturan mudah dipahami, menghindari penyimpangan dana (BOS)

Terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana >66%

Kurang terlaksana : Apabila indikator di atas terlaksana 34-66%

Tidak terlaksana :Apabila indikator di atas terlaksana <34%